

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari proses pendidikan pada berbagai jenjang yang dimiliki bangsa itu sendiri, termasuk kedalamnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan umum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, yaitu:

- (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Melalui ketiga dharmanya yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain proses pembentukan kualitas akademik melalui kegiatan belajar-mengajar juga melalui pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik yang bersifat kurikuler

maupun ekstrakurikuler sehingga mahasiswa dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal untuk berpartisipasi ditengah-tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perkembangan sejarah, sejak pra kemerdekaan hingga dewasa ini peran mahasiswa baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai bagian dari Infra struktur politik telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bahkan menjadi kekuatan terdepan untuk menciptakan perubahan tatanan kehidupan politik dan pemerintahan diantaranya:

- a. Pada tahun 1908 mahasiswa telah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui Budi Utomo;
- b. Pada tahun 1928, mahasiswa telah merintis kelahiran bangsa Indonesia melalui sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
- c. Menjelang tahun 1945, mahasiswa turut berperan dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atau kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pada tahun 1946-1949 (masa perang kemerdekaan), mahasiswa bergabung dalam tentara pelajar (TP/TRIP) bahu-membahu dengan rakyat dan TNI untuk melawan Belanda;
- e. Pada Tahun 1966, para mahasiswa beserta ABRI secara aktif berperan melahirkan Orde Baru mengakhiri kehadiran PKI di Indonesia
- f. Gerakan reformasi 13 Mei 1998 meruntuhkan orde baru
(Almamater-ku, 2001: 144 – 145).

Perkembangan terakhir adalah peran mahasiswa dalam memobilisasi gerakan massa yang dahsyat pada tanggal 13 Mei 1998 yang menuntut reformasi di bidang politik dan ekonomi yang pada puncaknya ditandai dengan runtuhnya Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Mengingat pentingnya partisipasi mahasiswa dalam pertumbuhan bangsa, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dalam Kebijakan tersebut ditegaskan bahwa tujuan kebijakan selaras dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu:

- (1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan /atau kesenian;
- (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Sasaran kebijakan adalah lingkungan Perguruan Tinggi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, sivitas akademika, pembimbing kemahasiswaan, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan kemahasiswaan dan strateginya. Selanjutnya

sebagai bahan pertimbangan dikenal juga istilah sasaran pengembangan kemahasiswaan yang terdiri dari berbagai rujukan, meliputi :

1. Tujuan pendidikan Nasional sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 4 UU No.2 tahun 1989 : “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pengerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
2. Kaidah, moral, dan etika Ilmu Pengetahuan;
3. Kepentingan masyarakat;
4. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran, dan perilaku pribadi sivitas akademika.

Berdasarkan titik tolak tersebut maka sasaran pengembangan kemahasiswaan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sasaran Umum, meliputi :
 - a. Jiwa Pancasila;
 - b. Kepemimpinan;
 - c. Dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan;
 - d. Ketahanan fisik dan mental.
2. Sasaran Khusus, meliputi :
 - a. Sikap Ilmiah : para mahasiswa dididik dan dilatih agar memiliki
 - 1) Hasrat ingin tahu dan belajar terus-menerus;
 - 2) Daya analisis yang tajam;
 - 3) Kejujuran;
 - 4) Rasa tanggung jawab yang tinggi;

- 5) Keterbukaan terhadap pendapat baru, pendapat yang berbeda, dan kritis;
- 6) Sikap bebas dari prasangka;
- 7) Orientasi ke masa depan;
- 8) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.

b. Sikap keahlian atau professional :

Para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki :

- 1) Keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi;
- 2) Kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan serta arah profesinya;
- 3) Etika profesi yang tinggi;
- 4) Kesejawatan yang tinggi.

Dewasa ini pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia sangat pesat. Untuk mewadahi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi, selain PTN yang keberadaannya ditunjang oleh pemerintah, peran PTS sebagai mitra pemerintah dibawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) yang menyebar di 12 wilayah di seluruh Indonesia, dalam menunjang pendidikan tentu saja tidak dapat diabaikan. Disamping jumlahnya yang jauh lebih banyak, varian jenis pendidikan yang ditawarkan serta sebarannya yang menjangkau hampir di seluruh daerah menjadikan PTS tidak hanya sebagai alternatif pilihan pendidikan tinggi. Namun demikian, pada aspek organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam hal pembinaan

dan pendanaan maupun partisipasi aktif mahasiswanya pada kegiatan kemahasiswaan terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara PTN dengan PTS.

Kondisi eksisting dewasa ini di wilayah kerja KOPERTIS Wilayah IV Jawa Barat dan Banten terdapat 122 buah Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi. Terdiri dari Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas dengan perkiraan jumlah mahasiswa sebanyak 12.674 orang (Kopertis Wilayah IV tahun 2006).

Dalam realitanya, partisipasi mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan belum sesuai dengan harapan. Fenomena-fenomena yang mendukung kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang organisasi kemahasiswaan yang meliputi; bentuk organisasi kemahasiswaan, kedudukan, fungsi dan tanggungjawab, kepengurusan dan keanggotaan serta sumber biaya atau pendanaan kemahasiswaan.
2. Kurangnya keterlibatan mahasiswa baik sikap, pendapat, dan tingkah-laku dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan

Selain fenomena-fenomena tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang dialami kemahasiswaan, baik yang bersumber dari dalam diri mahasiswa sendiri, dari dalam kampus perguruan tinggi maupun dari luar kampus. Masalah yang bersumber dari dalam diri mahasiswa itu sendiri.

1. Mahasiswa merupakan kelompok marginal yang memiliki kecenderungan anti keamanan, termasuk kurang menyenangi hal-hal yang diatur oleh pemerintah.
2. Mahasiswa Indonesia sebagian besar berasal dari generasi pertama yang belum memahami tradisi, norma dan etika akademik di Perguruan Tinggi.
3. Mahasiswa berasal dari berbagai golongan yang sangat heterogen sehingga dapat mengganggu kelancaran proses komunikasi.

Masalah yang bersumber dari dalam kampus perguruan tinggi.

1. Tradisi Ilmiah yang belum mengakar di kampus perguruan tinggi yang umumnya masih tergolong muda.
2. Kualitas dan kuantitas tenaga pembimbing kemahasiswaan yang masih terbatas.
3. Birokrasi perguruan tinggi yang belum mantap sehingga sering terjadi hambatan pelayanan administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan yang dapat meresahkan mahasiswa.
4. Organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi dewasa ini belum sepenuhnya dapat menampung dan menyalurkan kebutuhan, minat dan aspirasi para mahasiswa.
5. Tokoh atau pemimpin mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan mahasiswa lain masih terbatas jumlahnya, sehingga program kemahasiswaan masih sering tidak berjalan dengan lancar.

6. Dana dan fasilitas kemahasiswaan di perguruan tinggi yang terbatas, sehingga program kemahasiswaan kurang memperoleh daya dukung yang optimal.

Masalah yang bersumber dari luar kampus perguruan tinggi.

Pengalaman mahasiswa yang diperoleh dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sebelum memasuki pendidikan tinggi yang tidak selamanya positif bagi proses belajar di perguruan tinggi.

1. Perubahan tata nilai dalam masyarakat yang sangat cepat dalam era globalisasi dan informasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan mahasiswa yang juga cenderung menginginkan terjadinya perubahan secara serba cepat dan mendasar, sehingga tidak jarang hal tersebut berbenturan dengan kelompok mapan yang cenderung ingin mempertahankan *status quo*.
2. Pengaruh Suprastruktur dan Infrastruktur politik dan persaingan antar elit politik yang cenderung menjadikan kampus sebagai ajang politik praktis yang melibatkan mahasiswa sering berakibat pada sering timbulnya keresahan diantara mahasiswa.
3. Pers dan Media Massa yang diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan pendidikan belum memenuhi harapan.

Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut, menurut hemat penulis erat kaitannya dengan belum efektifnya faktor-faktor implementasi kebijakan yang menyangkut dimensi-

dimensi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur Birokrasi. Indikasi yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, antara lain :

1. Terjadinya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan;
2. Kurang memadainya sarana dan fasilitas implementasi kebijakan;
3. Tenaga pelaksana yang kurang memenuhi kualifikasi baik dari segi manajerial maupun skil; serta
4. Lemahnya koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengungkapkan lebih jauh Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Partisipasi Mahasiswa Dalam Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di Bandung raya.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan, pertanyaan penelitian (*problem question*) sebagai berikut : “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Partisipasi Mahasiswa Dalam Organisasi Kemahasiswaan di Bandung raya”.

Selanjutnya masalah pokok penelitian tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.

2. Seberapa besar pengaruh sumber -sumber implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.
3. Seberapa besar pengaruh disposisi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.
4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pemerintah tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mempelajari dan mengkaji pengaruh komunikasi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.
2. Mempelajari dan mengkaji pengaruh sumber-sumber implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.

3. Mempelajari dan mengkaji pengaruh disposisi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.
4. Mempelajari dan mengkaji pengaruh struktur birokrasi implementasi kebijakan terhadap partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Bandung raya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan konsep ilmu pemerintahan dalam mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan dengan partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan serta mengaplikasikan berbagai teori yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memperoleh tambahan informasi tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang organisasi kemahasiswaan oleh perguruan tinggi. Informasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Perguruan Tinggi di Bandung raya dalam melakukan upaya-upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan kegiatan kemahasiswaan.

